

## Analisis Perilaku Masyarakat Petambak Garam Terhadap Hasil Usaha di Kota Pasuruan

Sukesi

Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: greenpct@yahoo.com

---

**Abstract:** *Salt production quality that produced by farmers in Pasuruan currently far from the expected most of the entrepreneurs in general, it is very influential on the results of operations or income earned. The quality depends on the salt production season. So, one of them make less than optimal results of perations, and logicals on sequences have an impact on business results. By taking a sample of three districts, with a selection of sample locations based on potential areas, which will be taken from the district village, whose land has potential in the salt business people randomly selected 48 respondents. By using a qualitative research approach, which gives a clear descriptio of the conditions of social behavior, and economic situation of farmers against the salt business. Through a SWO analysis approaches to describe and interpret the meaning of secondary data and primary data, as well as the frequency table and served with direct quotes. In nominal income of the farmers of salt can be fairly large, but a problem because the income has not been able to raise the level of welfare. Found some respondents even though the education level is relatively low is able to achieve success in the salt business. But if traced further success factor is more in control of large tracts of land for salt production. Not on the capabilities and business skills that maximize limited resources to gain the maximum extent possible.*

**Key words:** *Community behavior, result of operations, economic empowerment.*

---

### PENDAHULUAN

Di Indonesia walaupun merupakan negara kepulauan, tetapi pusat pembuatan garam terkonsentrasi di Jawa dan Madura yaitu, di Jawa seluas 10.231 Ha (Jawa Barat 1.159 Ha, Jawa Tengah 2.168 Ha, Jawa Timur 6.904 Ha) dan Madura 15.347 Ha (Sumenep 10.067 Ha, Pamekasan 3.705 Ha, Sampang 2.205 Ha). Luas areal yang dikelola oleh PT. Garam hanya 5.116 Ha yang seluruhnya berada di pulau Madura yaitu Sumenep 3.163 Ha, Pamekasan 907 Ha dan di Sampang 1.046 Ha. Lokasi lainnya yaitu di NTB seluas 1.155 Ha, Sulawesi Selatan 2.040 Ha, Sumatera dan lain-lain 1.885 Ha, sehingga luas areal penggaraman seluruhnya sebesar 30.658 Ha di mana 25.542 Ha dikelola secara tradisional oleh rakyat. Areal garam yang dikelola oleh PT. Garam produksinya 60 ton/Ha/tahun, sedang garam rakyat hanya 40 ton/Ha/tahun (PT. Garam Persero 2000).

Jika diperhatikan di beberapa wilayah Jawa Timur khususnya petambak garam, pelaku usaha garam ini sebagian besar adalah petani, pengepul yang dalam hal ini dengan skala usaha kecil dan menengah dan beberapa usaha besar sebagai produsen industri olahan garam. Dengan melihat potensi yang dimiliki Jawa Timur maka prospek pengembangan manufaktur khususnya pengolahan garam, maka prospek pengembangan industri garam sangat potensial untuk dikembangkan. Dan kondisi tersebut dapat dijadikan sebuah peluang yang dapat dikembangkan dengan berbagai bentuk sistem kemitraan, agar peluang dan potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah prospek investasi, yang akhirnya akan memperbaiki kesejahteraan keluarga.

Produksi garam rakyat sebagian besar tidak dibeli, tetap menumpuk diladang, atau apabila dibeli dengan harga yang sangat rendah. Hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani garam. Dalam hal tersebut terjadi, maka "importasi garam" merupakan hal yang "disalahkan" dan PT Garam yang diprotes karena "dianggap" sebagai lembaga yang menangani pergaraman nasional (Sumber: Hot Issue PT Garam 22 Pebruari 2011).

Dinas Pertanian Kehutanan Kelautan Dan Perikanan Kota Pasuruan dalam paparan sosialisasi kegiatan pemberdayaan usaha garam (23 Maret 2011) menyampaikan adanya beberapa persoalan yang terdapat di masyarakat petani garam di antaranya: lemahnya kultur kewirausahaan petambak garam, infrastruktur dan fasilitas produksi tidak memadai, sulitnya akses permodalan, sistem tata niaga yang tidak berfihak kepada petambak, kebijakan importasi tidak menguntungkan petambak.

Di antara 32 lokasi wilayah penyangga usaha garam rakyat salah satunya adalah Kota Pasuruan. Seperti yang terjadi di Kota Pasuruan produksi garam rakyat sebagian besar tidak dibeli, tetap menumpuk diladang, atau apabila dibeli dengan harga yang sangat rendah. Hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani garam. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan salah satu di antaranya adalah kualitas dari hasil produksi garam kurang bagus.

Telah banyak program dan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah, yang terbaru tahun 2011 pelaksanaan PNPM Mandiri-KP terdiri atas Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). PUMP merupakan program pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat nelayan, pembudidaya serta pengolah dan pemasar ikan. Sedangkan PUGAR adalah merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak melalui prinsip *bottom-up* artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

Salah satunya melalui perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat petambak garam secara aktif guna menggali kebutuhan masyarakat dimaksud agar hasil usaha produksinya optimal dengan mekanisme *bottom up*. Tujuan dari perencanaan partisipatif ini adalah untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat petambak garam untuk terlibat secara aktif dalam penggalian gagasan, identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Selama ini para petambak garam kurang mendapat perhatian melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat 4 (empat) isu strategis yang menyebabkan pelaksanaan PUGAR yaitu: (1) isu kelembagaan yang menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas garam rakyat; (2) isu permodalan yang menyebabkan para petambak garam terutama dalam kategori kecil dan penggarap menjadi terjerat pada bakul, tengkulak dan juragan; (3) isu regulasi yang menyebabkan lemahnya keberpihakan dan proteksi pemerintah pada sektor garam rakyat, sehingga usaha garam rakyat menjadi tidak prospektif dan *marketable*; dan (4) isu tata niaga garam rakyat yang sangat liberalistik dengan tidak adanya penetapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat, sehingga terjadi deviasi harga yang sangat tinggi di tingkat produsen petambak garam dan pelaku pasar, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam di tingkat lokal.

Fenomena yang ada di lapangan program dan kegiatan pembangunan penanggulangan kemiskinan masyarakat petani garam yang dilakukan di masa lalu, seringkali kurang tepat sasaran, karena bantuan yang diberikan hanya menyentuh kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai akses informasi dan bukan merupakan kelompok masyarakat sasaran seharusnya menerima bantuan dimaksud. Sehingga salah satunya membuat hasil usaha

kurang optimal, dan konsekuensi logis berdampak pada hasil usaha. Berdasarkan dengan permasalahan tersebut, maka untuk mengetahui apakah hasil usaha berpengaruh terhadap perilaku masyarakat maka, memerlukan data informasi dan pemahaman yang obyektif tentang potensi lahan dan permasalahan usaha petambak garam rakyat khususnya di bidang sosial, dan ekonomi di Kota Pasuruan. Sasaran kegiatan apakah hasil usaha berpengaruh terhadap perilaku masyarakat petambak garam rakyat khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Pasuruan adalah tersedianya data dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam agar terjadi perubahan pengetahuan, persepsi, orientasi dan kapasitas usaha menuju proses kemandirian usaha.

## **Permasalahan**

Sesuai uraian latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan di antaranya:

1. Bagaimanakah perilaku sosial, dan ekonomi masyarakat petambak garam terhadap hasil usahanya di Kota Pasuruan?
2. Kendala-kendala atau permasalahan apakah yang dihadapi masyarakat petambak garam Kota Pasuruan dalam menjalankan usahanya?
3. Bagaimanakah potensi usaha petambak garam di Kota Pasuruan?

## **Tujuan**

Tujuan kegiatan kajian ini di antaranya adalah untuk:

1. Menganalisis perilaku sosial, dan ekonomi masyarakat petambak garam terhadap hasil usahanya di Kota Pasuruan;
2. Mengidentifikasi kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi masyarakat petambak garam Kota Pasuruan dalam menjalankan usahanya;
3. Mengetahui potensi usaha petambak garam di Kota Pasuruan.

## **Manfaat**

Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi masyarakat petambak garam
  - a. Sebagai informasi bahwa, hasil usaha berpengaruh terhadap perilaku sosial, dan ekonomi sehingga lebih lanjut diharapkan bisa memperbaiki pola pikir dan kapasitas dengan lingkungan masyarakat petambak garam dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas garam untuk menghasilkan usaha lebih baik.
  - b. Diketuainya profil beberapa kendala usaha garam
  - c. Diketuainya potensi usaha.
2. Bagi pemerintah sebagai referensi dokumen perencanaan kegiatan pemberdayaan usaha garam rakyat yang terstruktur dan berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Perilaku Masyarakat Pesisir Petambak Garam**

Pembangunan Nasional di masa lalu tidak berpihak kepada masyarakat pesisir, hal ini disebabkan karena kebijaksanaan pemerintah dimasa tersebut berorientasi pada eksploitasi

darat sebagai sasaran utama pembangunan nasional sehingga masyarakat pesisir menjadi terlupakan. Secara sosial ekonomi masyarakat pesisir sangat tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya dengan demikian dapat dipahami bila kantong-kantong kemiskinan adalah daerah pesisir. Masyarakat petambak garam merupakan salah satu dari masyarakat pesisir yang selama ini kurang mendapat perhatian melalui kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Temuan berbagai tantangan di bidang pemasaran dan permodalan ini cukup ironis jika dibandingkan dengan keinginan yang disampaikan oleh petambak garam dalam aspek kemitraan. Ditengah rendahnya peranan lembaga koperasi dalam usaha garam rakyat, justru petambak garam di Kota Pasuruan sangat mengharapkan pola kemitraan yang dijalin dengan koperasi. Aspirasi tersebut disampaikan oleh 55,10 persen atau 46 orang petambak garam. Pola kemitraan berikutnya yang diinginkan adalah jalinan kemitraan dengan pemerintah yang dipilih oleh 23,47 persen atau 19 orang petambak. Pola kemitraan dengan pengusaha atau industri dipilih oleh 15,34 persen atau 13 orang petambak garam. Dan pola kemitraan dengan pihak swasta hanya diinginkan oleh 6,12 persen atau 5 orang petambak.

### Perilaku Sosial Masyarakat Pesisir

Zamroni (1992) menyatakan bahwa perilaku sosial merupakan hubungan antara tingkah laku masyarakat dengan tingkah laku lingkungan. Indikator-indikator perubahan perilaku sosial berbeda-beda pandangan setiap ahli. Jayasuriya dan Wodon (2002) melakukan riset di sejumlah negara menggunakan 2 kategori utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Africa (2003) menggunakan indikator kebutuhan dasar minimum-sistim informasi data masyarakat (MBN-CBIS) dengan 3 indikator utama yaitu *survival, security dan enabling*. Usman (2003) memberikan 3 komponen utama dalam mengupas permasalahan di masyarakat yang terkait dengan kondisi lingkungan yaitu: demografi, ekonomi dan budaya.

Dalam tulisannya Kusnadi tentang "Kebudayaan Masyarakat Nelayan. Salah satu ciri perilaku sosial dari masyarakat pesisir yang terkait dengan sikap temperamental dan harga diri tersebut dapat disimak dalam pernyataan antropolog Belanda di bawah ini (Boelaars, 1984:62): Orang pesisir memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan, dan gampang cenderung balas-membalas sampai dengan pembunuhan. Orang pesisir memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi.

Ciri-ciri perilaku sosial di atas memiliki relevansi dengan ciri-ciri kepemimpinan sosial masyarakat pesisir. Berdasarkan kajian filologis atas naskah-naskah klasik (*kuno*) yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, seperti *Kitab Sindujoyo Pesisiran* dan *Babad Gresik Pesisiran*, syarat-syarat pemimpin di kalangan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut (Widayati, 2001:3):

1. Siap menolong siapa saja yang meminta bantuan.
2. Mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.
3. Dermawan kepada semua orang.
4. Selalu menuntut ilmu dunia dan akhirat untuk keseimbangan kehidupan.
5. Tidak berambisi terhadap jabatan atau kedudukan walaupun banyak berjasa.
6. Rendah hati (*tidak sombong*), tetapi tidak rendah diri (*minder*).
7. Sangat benci penindasan dan berbuat adil kepada siapa saja.

8. Rajin bekerja dan beribadah, khususnya shalat lima waktu.
9. Sabar dan bijaksana.
10. Berusaha membahagiakan orang lain.

Sebagian nilai-nilai perilaku sosial di atas merupakan modal sosial yang sangat berharga jika didayagunakan untuk membangun masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Demikian juga, syarat-syarat pemimpin dan kepemimpinan masyarakat pesisir memiliki relevansi yang baik untuk merekonstruksi kepemimpinan bangsa dan Negara Indonesia. Penjelajahan terhadap nilai-nilai budaya kepesisiran ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis pada potensi sumber daya kemaritiman nasional.

### **Pemberdayaan**

Perumusan Dasar program penanganan pengentasan masyarakat miskin ini diarahkan dan dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat miskin baik fisik maupun non fisik, kualitas sistim sosial masyarakat (dititik beratkan pada aspek kelembagaan dalam masyarakat);
2. Pendekatan peningkatan dan perluasan kegiatan usaha bagi masyarakat miskin baik melalui kebijakan pembinaan dan pendampingan serta penciptaan lapangan kerja baru untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi (minimal peningkatan pendapatan);
3. Pendekatan peningkatan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat miskin melalui berbagai fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat supaya aksesibilitas masyarakat miskin memiliki peluang yang sama (tingkat pososi tawar-menawar);
4. Pendekatan peningkatan jaminan sosial melalui berbagai program *social needs* yang bisa secara langsung diakses oleh masyarakat miskin.

Meski peran pemerintah sangat besar dalam rangka menangani kemiskinan, namun partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk menjamin berhasilnya program yang dicanangkan. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Banyak kasus yang menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini terjadi karena:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan,
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut,
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara-cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut,
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan (Kartasmita, 1997).

Karena itu menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa pembangunan:

- (1) harus menguntungkan rakyat,
- (2) harus bisa dipahami oleh rakyat,
- (3) harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan

- (4) dilaksanakan sesuai dengan maksud dan keinginan rakyat secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari berbagai studi empiris yang dilakukan David Korten diperoleh data bahwa program-program pemberdayaan masyarakat memiliki kecenderungan sebagai berikut:

1. Terdapat ketergantungan pada birokrasi yang hanya mempunyai sedikit kesempatan dan kemampuan untuk menanggapi beraneka ragam kebutuhan khas komunitas,
2. Investasi yang tidak memadai dalam proses pengembangan kemampuan komunitas untuk memecahkan masalah,
3. Perhatian yang kurang dalam menangani keanekaragaman masyarakat,
4. Tidak cukupnya integrasi antara komponen-komponen teknis dengan sosial dalam upaya pembangunan (Korten: 1988).

Gunawan Sumodiningrat (Sumodiningrat: 1999) sekretaris komite penanggulangan kemiskinan nasional, mengidentifikasi kelemahan utama program pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu:

1. Pengelolaan usaha yang masih sangat tradisional,
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai,
3. Skala dan teknik produksi yang rendah,
4. Masih terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya ke perbankan,
5. Rendahnya akuntabilitas di tingkat masyarakat yang disebabkan persepsi yang keliru bahwa dana tersebut milik masyarakat yang tidak perlu dipertanggungjawabkan ke pemerintah,
6. Sistem pembiayaan melalui kredit program, terutama dalam bentuk dana hibah bergulir, cenderung tidak mendorong penerapan dan pengembangan sistem dan mekanisme pembiayaan yang benar dan profesional, yaitu melalui lembaga perbankan/lembaga keuangan bukan bank,
7. Program-program pemberdayaan masyarakat yang cenderung mudah dijadikan komoditas politik yang akhirnya menimbulkan kesalahan persepsi (distorsi) dan merusak akuntabilitas di tingkat akar rumput.

Dari beberapa kajian para ahli juga ditemukan beberapa persoalan yang menjadi permasalahan dalam penanganan kemiskinan yang terjadi selama ini. Persoalan itu di antaranya:

1. Perencanaan program yang dibuat dan dilaksanakan kurang ada keterpaduan satu dengan lainnya;
2. Kurang adanya koordinasi yang baik antara masing-masing instansi dalam pelaksanaan program yang terkait dengan masyarakat miskin;
3. Penetapan target sasaran masyarakat miskin masih kurang tepat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program tidak ada tolok ukur yang terencana;
5. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masih terbatas;
6. Keterbatasan pembiayaan yang dianggarkan oleh pemerintah.

Yang jelas, kini dengan keterbatasan sumber daya pemerintah dan dengan adanya beberapa perubahan manajemen pemerintahan dari sentralistik ke arah desentralistik sesuai dengan nafas otonomi yang diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004, maka penanganan dan tanggung jawab untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat miskin bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah juga harus ikut bertanggung jawab untuk mengatasinya bersama-sama elemen masyarakatnya sendiri.

Upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan pendekatan yang dipergunakan perlu dikaji kembali supaya mampu mencakup berbagai sektor (lintas sektoral) sesuai dengan klasifikasi indikator dan karakteristik masyarakat miskin. Sehingga rumusan strategi penanganannya akan lebih terpadu, tepat sasaran dan tingkat keberhasilan akan lebih efektif. Berbagai hambatan prosedur dan birokrasi serta kurang terkoordinasinya program-program yang dilaksanakan selama ini perlu disempurnakan. Demikian juga persepsi bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua elemen pemerintah dan masyarakat perlu disosialisasikan.

Untuk mendukung tingkat keberhasilan penanganan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin tersebut, maka pemerintah daerah perlu menyusun sebuah perencanaan berupa rencana strategik pengentasan kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Ini semua sebagai pedoman dalam melaksanakan program serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada masyarakat.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Kajian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *qualitative research*, yakni memberikan diskripsi secara jelas tentang kondisi perilaku sosial, dan ekonomi masyarakat petambak garam terhadap hasil usahanya di Kota Pasuruan. Dari hasil identifikasi kemudian dilanjutkan analisis data.

### Lokasi Kegiatan dan Pengambilan Sampel

Kegiatan kajian Analisis Perilaku Masyarakat petambak Garam terhadap Hasil Usaha ini, akan dilaksanakan di Kota Pasuruan dengan mengambil tiga wilayah kecamatan sebagai sampel. Pemilihan sampel lokasi berdasarkan wilayah potensi, dimana dari kecamatan tersebut akan diambil kelurahan yang daerahnya memiliki potensi dalam usaha garam rakyat. Hasil pemetaan melalui survei yang dilakukan ditemukan sebaran lokasi tambak garam berada di 10 kelurahan/desa yang tersebar di 3 kecamatan.

**Tabel 1.** Sebaran Lokasi Potensi Area Tambak Garam

No.	Lokasi Kecamatan	Lokasi Kelurahan / Desa
1.	Gadingrejo	Gadingrejo, Tambaan, dan Trajeng
2.	Purworejo	Mayangan, dan Ngemplakrejo
3.	Bugul Kidu;	Blandongan, Kepel, Tapaan, Mandaranrejo, & Panggungrejo.

Sumber: Survey Lapangan

### Jenis, Sumber Data, dan Tehnik Pengumpulan

Jenis data yang dibutuhkan terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder, meliputi:

#### a. Jenis Data

- 1) Data primer diperoleh melalui penyebaran kuisisioner, observasi dan wawancara
- 2) Data Sekunder diperoleh dari berbagai kebijakan dan peraturan, literatur dan dokumen terkait.

b. Sumber Data

Data kajian ini dapat diperoleh dari:

- 1) Pihak Eksekutif;
  - ✓ Bappeko Kota Pasuruan
  - ✓ Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
  - ✓ Kecamatan
- 2) Unsur Masyarakat
  - ✓ Masyarakat Tambak Garam.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Agar data yang diharapkan dalam kajian ini dapat digali secara baik maka dalam kajian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- 1) Interview: yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden yang terkait dengan kajian ini baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur.
- 2) Kuesioner: yaitu dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden.
- 3) Focus Group Discussion (FGD): Yaitu dengan metode diskusi kelompok untuk menggali data dan informasi agar lebih mendalam.
- 4) Dokumenter: yaitu melakukan pelacakan terhadap data yang pernah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang berupa dokumen- dokumen dari instansi yang terkait dengan kajian ini.

## Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasi makna dari data sekunder dan data primer, serta disajikan dengan tabel frekuensi dan uraian kata-kata serta kutipan langsung dari terwawancara.

### 1. Analisa SWOT

KONSEP ANALISIS SWOT merupakan singkatan dari kata Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Menurut Sihombing (2000), kata Threats mengandung unsur yang negatif, sehingga lebih cenderung menggunakan kata yang mengandung unsur positif yaitu tantangan (Challenges).

a. Kekuatan

Maksud kekuatan dalam analisis ini adalah faktor-faktor yang mendukung penyelenggaraan program, serta diakui eksistensinya oleh semua pihak (masyarakat).

b. Kelemahan

Maksud kelemahan dalam analisis ini adalah permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan program dan hasilnya. Permasalahan merupakan kelemahan yang dapat berubah menjadi tantangan kelancaran pelaksanaan tugas/ program.

c. Peluang

Maksud peluang dari analisis ini adalah hal-hal atau faktor-faktor dari luar program yang kalau dicermati dan dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi tumpuan harapan dimasa depan.

d. Tantangan

Maksud tantangan dalam analisis ini adalah hal-hal yang harus diatasi, direbut, diperbaiki dan ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam usaha mencapai tujuan. Tantangan bukan penghambat, tetapi perangsang untuk

mendorong perencana pendidikan luar sekolah untuk lebih kreatif dan dinamis. Tantangan dapat berubah menjadi peluang bagi perencana yang tidak berperilaku apatis, statis dan mudah puas.

## 2. Pengolahan Data

Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tabulasi. Tabel-tabel dibuat sesuai dengan kebutuhan untuk analisis data. Yaitu sesuai permasalahan yang telah peneliti ajukan di depan, di mana diharapkan hasil kegiatan dari kajian hasil usaha berpengaruh terhadap perilaku masyarakat petambak garam rakyat khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan petambak garam masyarakat Kota Pasuruan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan (*pro poor*) dan kesempatan kerja petambak garam (*pro job*), serta meningkatkan produktivitas dan kualitas garam.

## HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Tabulasi

**Tabel 2.** Prosentase Responden berdasarkan Lokasi, dan Jumlah

No	Desa/Kelurahan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Gading Rejo	3	6,25%
2	Panggungrejo	18	37,50%
3	Ngemplakrejo	6	12,50%
4	Kepel	3	6,25%
5	Blandongan	1	2,08%
6	Tapak'an	4	8,33%
7	Mandaran Rejo	13	27,08%
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Survey Lapangan

Berdasar lokasi tinggal para petambak, temuan menarik diantaranya: *pertama*, kondisi geografis sebuah desa sangat berpengaruh pada pilihan mata pencaharian masyarakat setempat. Maka wilayah-wilayah yang berhadapan langsung dengan Selat Madura memiliki potensi besar sebagai lokasi tempat tinggal petambak garam. *Kedua*, tidak semua petambak garam bertempat tinggal di sekitar lahan garam. Artinya kepemilikan lahan garam tidak didasarkan pada lokasi tempat tinggal petambak. Asumsi ini diperkuat dengan banyaknya mekanisme sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petambak garam. Penyebaran jumlah responden berdasarkan wilayah potensi, berdasarkan tabel 2 tersebut yang terbanyak berasal dari Desa Panggungrejo 18 petambak, dan paling sedikit wilayah potensi 1 petambak yaitu di Desa Blandongan, sisa nya menyebar di 5 wilayah.

Sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan terhadap hasil produksi dan pengelolaan usaha pada petani garam di Kota Pasuruan dalam kegiatan ini memang peneliti abaikan, tingkat pendidikan ini hanya sebagai gambaran. Di 7 wilayah responden tingkat pendidikan sangat heterogin ada yang tidak tamat SD dan maksimal pendidikan SLTA/ sederajat.

**Tabel 3.** Rata-rata Tingkat Pendidikan Respoden

No	Desa/Kelurahan	Tidak Tamat SD	SD	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma	Sarjana
1.	Gading Rejo	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%
2.	Panggungrejo	11,11%	44,44%	22,22%	22,22%	0,00%	0,00%
3.	Ngemplakrejo	0,00%	66,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%
4.	Kepel	0,00%	33,33%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%
5.	Blandongan	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Tapak'an	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%
7.	Mandaran Rejo	0,00%	33,33%	41,67%	25,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Survey Lapangan

**Tabel 4.** Pekerjaan selain sebagai petambak garam

No	Desa/Kelurahan	Ada	Tidak
1.	Gading Rejo	66,67% Penjual ikan	orang 33,33%
2.	Panggungrejo	44,44% Penjual ikan	orang 55,56%
		Merancang	orang
		Nelayan	orang
		Toko	orang
		Pedagang	orang
3.	Ngemplakrejo	50,00% Pengrajin kayu	orang 50,00%
		Pedagang	rang
4.	Kepel	66,67% Pedagang rumput laut	orang 33,33%
		Pabrik valet	orang
5.	Blandongan	0,00%	- 100,00%
6.	Tapak'an	75,00% Tambak Ikan	orang 25,00%
		Warung Lesehan	orang
7.	Mandaran Rejo	46,15% Toko	orang 53,85%
		Petani sawah	orang
		Merancang	orang
		Cetak Garam Briket	orang
		Jual beli besi tua	orang

Sumber: Survey Lapangan

Selain sebagai petambak garam sebanyak 48 responden, penghasilan lain petani garam di Ngemplakrejo sebagian besar sebagai penjual ikan, sedangkan di Desa Mandaran Rejo berdagang dengan buka toko, untuk wilayah lain Kepel, Tapakan, Blandongan sebagian besar pengrajin kayu, pedagang rumput laut, merancang, buka warung, petani sawah, dan petambak

**Tabel 5.** Penghasilan bersih tambak garam

No	Desa/Kelurahan	≤ 5.000.000	5.000.001 – 10.000.000	10.000.001 – 15.000.000	15.000.001 – 20.000.000	≥ 20.000.001
1.	Gading Rejo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2.	Panggungrejo	30,77%	7,69%	0,00%	30,77%	30,77%
3.	Ngemplakrejo	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	60,00%
4.	Kepel	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Blandongan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Tapak'an	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Mandaran Rejo	22,22%	22,22%	22,22%	11,11%	22,22%

Sumber: Survey Lapangan

Secara nominal penghasilan para petambak garam bisa dibilang cukup besar. Tetapi menjadi persoalan adalah apakah dengan penghasilan tersebut mampu mengangkat tingkat kesejahteraan hidup para petambak garam?. Hasil wawancara terhadap reponden ternyata penghasilan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh petambak garam, tetapi harus dibagi dengan para pihak lain yang meminjamkan modal untuk mengolah lahan tambak garam. Hanya bagi petambak garam yang berstatus sebagai pemilik lahan dan mengolah lahan secara mandiri yang dapat merasakan kesejahteraan dengan tingkat pendapatan tersebut.

**Tabel 6.** Teknologi yang dipakai

No	Desa/Kelurahan	Intensif	Semi Intensif	Tradisional
1.	Gading Rejo	0%	0%	100,00%
2.	Panggungrejo	0%	0%	100,00%
3.	Ngemplakrejo	0%	0%	100,00%
4.	Kepel	0%	0%	100,00%
5.	Blandongan	0%	100,00%	0%
6.	Tapak'an	0%	0%	100,00%
7.	Mandaran Rejo	0%	0%	100,00%

Sumber: Survey Lapangan

Pada tabel 5, dan tabel 6 tersebut di atas tergambar, bahwa ada pengaruh teknologi pengolahan garam dengan penghasilan bersih yang diperoleh petani garam. Jika melihat kondisi alat produksi yang dimiliki petambak garam di Kota Pasuruan memang jauh dari kata ideal bagi pengolahan usaha garam. Dari 6 wilayah kegiatan responden yaitu Gading Rejo, Panggungrejo, Ngemplakrejo, Kepel, Tapak'an Mandaran Rejo dalam teknologi pengelolaan garam masih tradisional, namun penghasil usaha yang mereka dapatkan dengan luas wilayah garapan setiap kali panen sebagian besar masih berkisar  $\leq 5.000.000$ , dan ada dua wilayah desa/kelurahan petani garam yang menghasilkan  $\geq 20.000.001$  yaitu petani garam wilayah Panggungrejo, dan Ngemplakrejo.

**Tabel 7.** Cara pemasaran hasil tambak

No	Desa/Kelurahan	Disetorkan ke Koperasi	Dijual sendiri	Melalui Tengkulak	Langsung ke pabrik
1.	Gading Rejo	0%	0%	100,00%	0%
2.	Panggungrejo	0%	16,67%	83,33%	0%
3.	Ngemplakrejo	0%	0%	100,00%	0%
4.	Kepel	0%	0%	33,33%	66,67%
5.	Blandongan	0%	0%	0%	100,00%
6.	Tapak'an	0%	25,00%	50,00%	25,00%
7.	Mandaran Rejo	0,00%	14,29%	64,29%	21,43%

Sumber: Survey Lapangan

Aspek berikutnya tersebut tabel 7 yang menjadi tantangan bagi petambak garam di Kota Pasuruan adalah pola pemasaran. Kondisi pemasaran dirasa kurang begitu menguntungkan bagi petambak gaam yang ada, karean peranan tengkulak cukup dominan dalam proses pemasaran hasil garam. Sebanyak 100 persen petambak menyatakan harus menggunakan jasa tengkulak dalam memasarkan hasil garam yaitu Desa Gadingrejo, dan Ngemplakrejo. Sedangkan Panggungrejo sebanyak 83,33 persen menggunakan jasa tengkulak, 50% untuk

petani wilayah Tapa'an, dan berikutnya 33,33 persen untuk Kepel. Sebanyak 100 persen petambak Desa Blandongan, 66,67 persen Desa Kepel, dan 25 persen petambak Desa Tapa'an menyatakan menjual langsung ke industri.

**Tabel 8.** Ketersediaan Lembaga Penyuluh

No	Desa/Kelurahan	Ada	Tidak Ada	Tidak Tau
1.	Gading Rejo	100,00%	0%	0%
2.	Panggungrejo	0%	88,24%	11,76%
3.	Ngemplakrejo	0%	83,33%	16,67%
4.	Kepel	66,67%	33,33%	0%
5.	Blandongan	0%	100,00%	0%
6.	Tapak'an	0%	0%	100,00%
7.	Mandaran Rejo	0%	66,67%	33,33%

Sumber: Survey Lapangan

Harapan para petambak bagi keberadaan lembaga penyuluh disampaikan oleh 70,27 persen responden. Lembaga penyuluh ini dapat difungsikan sebagai pendamping kelompok usaha garam yang nantinya terbentuk. Terlebih keberadaan penyuluh dan pendamping semakin penting ditengah ketidakberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Pasuruan. Terlihat pada tabel 8 hanya Desa Gadingrejo yang merasa adanya keberadaan lembaga penyuluh, sedangkan untuk wilayah lain responden menyatakan tidak pernah menjumpai adanya lembaga penyuluh khusus untuk pengembangan kelompok petambak garam.

Kondisi ini menjadi landasan bagi rencana pembentukan kelompok usaha garam. Pembentukan kelompok usaha garam dapat ditunjang dengan keberadaan program pemberdayaan usaha garam rakyat. Pembentukan kelompok dianggap sebagai langkah efektif dan efisien dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Melalui kelompok model-model pendampingan terhadap usaha ekonomi tertentu dapat berlangsung secara berkelanjutan. Melalui kelompok pula beberapa aktifitas pelatihan dan bantuan permodalan lebih dapat dipantau oleh petugas pendamping/penyuluh maupun kontrol secara internal dari masing-masing anggota.

**Tabel 9.** Petambak Garam Berdasar Keberadaan Kelompok Tani Garam

Option	Keberadaan kelompok tani garam	Responden	Prosentase(%)
a.	Ada	7	17,28
b.	Tidak ada	26	61,73
c.	Tidak tahu	15	20,99
TOTAL		48	100,00

Sumber: Survey Lapangan

Terbatasnya informasi tentang keberadaan kelompok tani garam juga didukung dengan temuan bahwa sebanyak 61,73 persen responden menyatakan tidak terlibat atau tergabung dalam kelompok. Meski sebanyak 17,28 persen responden mengetahui keberadaan kelompok tani garam, ternyata hanya 12,83 persen responden yang menyatakan terlibat dan tergabung dalam kelompok.

Gagasan pembentukan kelompok mendapat respon positif dari 98,73 persen responden, meski demikian masih ditemukan 1,27 persen responden menyatakan tidak setuju dengan

gagasan pembentukan kelompok. Keinginan untuk membentuk kelompok usaha garam rakyat ternyata memiliki alasan yang berbeda-beda disampaikan oleh responden. Beberapa alasan responden, antara lain:

1. Kesadaran responden bahwa memang belum ada kelompok usaha garam yang mampu menjadi wadah para petambak garam. Pilihan responden dengan kategori "tidak ada" dan "tidak tahu" menunjukkan memang kelompok usaha garam memang belum begitu berperan dalam usaha garam yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pasuruan.
2. Kesadaran akan manfaat dengan adanya kelompok usaha garam.
3. Kemanfaatan yang menjadi harapan responden ketika dibentuk kelompok usaha garam. Alasan yang paling banyak dipilih adalah; 1). Mempermudah pinjaman alat produksi; 2). Mempermudah penjualan pasca-panen; dan 3). Mempermudah pinjaman modal usaha.
4. Belum banyak responden yang tergabung dalam kelompok usaha garam yang ada sekarang. Selain faktor ketidaktahuan keberadaan kelompok usaha yang terbentuk sekarang, juga kelompok usaha garam yang ada sekarang terbatas pada wilayah desa tertentu.

## **Pembahasan Hasil**

### **Perilaku sosial, dan ekonomi masyarakat petambak garam terhadap hasil usahanya di Kota Pasuruan.**

Tingkat pendidikan responden ini tentunya secara tidak langsung akan berpengaruh pada pola usaha yang dijalankan oleh para petani tambak di Kota Pasuruan. Rata-rata responden mengusahakan tambak garam dengan manajemen usaha yang cukup sederhana. Padahal tuntutan dunia usaha yang lebih maju mengharuskan pola pengaturan usaha yang lebih profesional dan modern.

Memang ditemukan beberapa responden meski dengan tingkat pendidikan yang masih terbilang rendah mampu meraih kesuksesan dalam usaha garam. Tetapi bila ditelusuri lebih jauh faktor kesuksesan lebih pada penguasaan lahan yang luas untuk produksi garam. Bukan pada kemampuan dan ketrampilan usaha yang memaksimalkan sumber yang terbatas untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Tingkat pendidikan para petambak garam didominasi oleh pendidikan SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat. Tingkat pendidikan SLTA/Sederajat tertinggi berada di Desa Kepel yang mencapai 66,67 persen. Rata-rata sebanyak 30 persen petani tambak garam berpendidikan SD. Beberapa responden juga masih ditemukan tidak tamat SD. Misalnya di Desa Panggungrejo (11,11 persen) petani tambak garam tidak tamat SD.

Setidaknya terdapat dua faktor utama yang menyebabkan profil pendidikan para petani tambak garam masih cukup rendah. Antara lain:

- 1) Faktor ekonomi masih menjadi alasan sebagian besar responden. Bila menggunakan klasifikasi masyarakat menurut Greetz, mungkin sebagian besar petani tambak garam saat ini merupakan kelas pribumi yang kurang begitu mendapat kesempatan pendidikan yang layak pada jamannya;
- 2). Pendidikan bagi sebagian masyarakat yang lahir pada kurun waktu 1960-an bukan merupakan faktor utama dalam kesuksesan seseorang. Kondisi ini dibuktikan rata-rata usia responden 48 tahun menunjukkan pemahaman masyarakat saat itu tentang pendidikan masih terbilang rendah;

- 3). Persoalan budaya yang memilih bekerja daripada harus menempuh pendidikan cukup tinggi. Sebigain besar petani tambak berasal dari tingkat ekonomi yang belum mapan maka bekerja menjadi priorita sutama daripada pendidikan;
- 4). Kultur masyarakat yang lebih mengutamakan pendidikan ke-agama-an (santri atau mondok) menjadikan kurangnya minat dalam menempuh pendidikan formal; dan
- 5). Keterampilan dalam melakukan usaha ekonomi tambak garam tidak diperoleh dari bangku pendidikan formal, tetapi lebih pada pengalaman dalam melakukan usaha tambak garam sebagai sandaran kehidupan keluarga.

Faktor pendidikan memang kurang begitu dirasakan korelasinya dengan pola usaha garam yang dilakukan para responden. Pola-pola usaha yang sederhana menjadikan petani tambak terjebak pada pola yang sulit berkembang. Konsekuensi lebih lanjut, tidak heran bila meski jumlah produksi garam tiap petani tambak mampu menghasilkan pendapatan cukup tinggi tetapi masih kurang begitu sejahtera untuk tingkat ekonominya. Keterbatasan pendidikan formal ini harus dijembatani dengan berbagai bentuk penguasaan ketrampilan yang bersifat teknis dan aplikatif dalam bidang pola ekonomi usaha tambak garam.

Ketrampilan dalam usaha tambak garam lebih ditentukan dari pengalaman yang dimiliki oleh responden. Semakin lama responden menekuni usaha tambak garam semakin tinggi ketrampilan yang dimiliki orang tersebut di bidang usaha garam. Tingkat pengalaman responden juga ditunjukkan dari data survey yang menjelaskan kecenderungan responden dalam melakukan pola sewa-menyewa lahan, jangka waktu yang dipilih tidak kurang dari 5 tahun hingga 15 tahun. Dan hanya sebigain kecil responden yang enyewa lahan garam kurang dari 5 tahun. Tingginya pengalaman dalam usaha garam juga dipengaruhi oleh sumber pendapatan yang dimiliki responden. Misalnya di Desa Blandongan semua responden di lokasi tersebut menggantungkan kehidupan sehari-hari dari hasil tambak garam, itulah yang mengharuskan responden untuk melakukan usaha tambak garam secara serius. Tidak banyak responden yang memilki pekerjaan sampingan di luar usaha tambak garam.

Aspek ekonomi masyarakat yang salah satunya ditentukan dari pendapatan hasil usaha produksi garam. Luas area tambak garam yang dimiliki penduduk Kota Pasuruan merupakan faktor yang menentukan bagi penghasilan setiap kali masa panen tiba. Semakin luas area tambak garam tentunya akan menghasilkan jumlah produksi garam yang semakin banyak. Hasil survei mengenai penghasilan rata-rata setiap kali panen menunjukkan bahwa, dari total 48 responden denga penghasilan Rp. 10.000.001,- hingga Rp. 15.000.000,- mencapai 6,56 persen atau 5 responden. Sedangkan penghasilan Rp. 15.000.001,- hingga Rp. 20.000.000,- mencapai 14,75 persen atau 12 responden. Bahkan sebanyak 26,23 persen responden mengakui penghasilan dari usaha garam rakyat yang dilakukan mampu menghasilkan hingga  $\geq$  Rp. 20.000.001,- dalam sekali masa panen. Tetapi juga sebanyak 26,23 persen responden mengakui bahwa hasil dari usaha garam yang dilakukan hanya menghasilkan pendapatan tidak lebih dari  $\leq$  Rp. 5.000.000 hingga Rp. 10.000.000,-.

Artinya dari penghasilan usaha garam sangat ditentukan oleh lima faktor utama. *Pertama*, luas area tambak garam yang dimiliki. *Kedua*, masa dan waktu panen yag dibutuhkan yang sangat menggantungkan diri pada musim kemarau. Jangka waktu panen usaha garam cukup beragam denga rata-rata 6 hingga 8 bulan. *Ketiga*, kualitas garam yang dihasilkan yang sangat menentukan harga per/kg di pasaran.

Jika didasarkan kualitas garam yang dihasilkan, sebigaian besar tambak garam di Kota Pasuruan menghasilkan kualitas garam K2 yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri pegolahan. *Keempat*, model pemasaran yang dilakukan juga menjadi faktor penentu

besar pendapatan dari usaha garam. Hasil wawancara dengan responden menggambarkan bahwa seringkali harga garam sangat rendah karena peran tengkulak dan para spekulan yang menjadi perantara antara petambak dengan industri.. *Kelima*, faktor kemasan garam juga akan sangat berpengaruh pada harga garam yang dihasilkan. Misalnya bentuk garam krosak dengan garam briket atau kemasan tentunya akan memberikan perbandingan harga yang jauh besar. Kurangnya kesadaran petambak garam dalam memberikan nilai tambah pada produk garam yang dihasilkan juga masih menjadi kendala tersendiri dalam peningkatan mutu garam yang dihasilkan. Faktor pengetahuan, informasi tentang pengolahan produk garam juga menjadi kendala tersendiri.

Secara nominal penghasilan para petambak garam bisa dibilang cukup besar. Tetapi menjadi persoalan adalah apakah dengan penghasilan tersebut mampu mengangkat tingkat kesejahteraan hidup para petambak garam?. Hasil wawancara terhadap reponden ternyata penghasilan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh petambak garam, tetapi harus dibagi dengan para pihak lain. Gambaran ini ditunjukkan oleh para petambak yang berstatus sebagai penyewa dengan pola bagi hasil. Sebagaian lain dari para petambak, hasil tersebut harus dibagi dengan pihak yang meminjamkan modal untuk mengolah lahan tambak garam. Hanya bagi petambak garam yang berstats sebagai pemilik lahan dan mengolah laha secara mandiri yang dapat merasakan kesejahteraan dengan tingkat pendapatan tersebut.

Kondisi demikian tentunya menggambarkan kerentanan secara ekonomi bagi sebagai besar petambak garam di Kota Pasuruan, terutama bagi 75,90 persen responden yang berstatus penyewa. Kerentanan secara ekonomi dapat diilustrasikan sebagai berikut: "Jika masa panen 6 hingga 8 bulan, maka sebenarnya lahan tambak praktis tidak produktif selama 4 hingga 2 bulan, tetapi petambak garam dengan sistem sewa tunai harus membayar uang sewa tidak kurang dari ± Rp. 3.638.889,- setap tahun. Terlebih tidak banyak petambak garam di Kota Pasuruan yang memiliki mata pencaharian sampingan diluar usaha garam. Karena usaha garam sangat tergantung pada musim kemarau, usaha garam rakyat dengan penggunaan teknologi sederhana sanat rentan terjadi 'gagal panen'. Da ini pernah terjadi pada tahun 2010 yang lalu, sehingga banyak petambak garam yang mengalami kerugian yang cukup besar.

### **Kendala-kendala atau permasalahan masyarakat petambak garam Kota Pasuruan dalam menjalankan usahanya**

Temuan berbagai tantangan di bidang pemasaran dan permodalan ini cukup ironis jika dibandingkan dengan keinginan yang disampaikan oleh petambak garam dalam aspek kemitraan. Ditengah rendahnya peranan lembaga koperasi dalam usaha garam rakyat, justru petambak garam di

Kelemahan dalam aspek permodalan juga menjadi masukan bagi perbaikan kelembagaan koperasi. Karena belum optimalnya kelembagaan koperasi sebagai kelembagaan permodalan yang mampu menunjang peningkatan usaha garam di Kota Pasuruan Permodalan banyak dilakukan dengan meminjam ke petambak yang lebih sukses ini tidak terlepas dari pola budaya yang terbentuk. Antara lain; 1). Para petambak garam secara umum merupakan satu keluarga besar yang memiliki ikatan kekeluargaan cukup kental, sehingga pilihan untuk melakukan pinjaman permodalan ke petambak yang lebih sukses lebih didasarkan pada ikatan keluarga dan kedekatan; 2). Yang dimaksud sebagai pedagang sukses adalah para pemilik lahan garam yang menyewakan lahan ke pihak lain untuk diolah. Pola permodalan biasanya untuk penggarap akan diberikan modal terlebih dulu dan pengembalian dilakukan pasca-panen; 3). Meminjam ke petambak yang lebih sukses diniali lebih ringan daripada menanggung biaya

bunga ketika harus meminjam ke koperasi atau lembaga permodalan. Aspek permodalan yang dilakukan oleh petambak garam banyak dimanfaatkan untuk peningkatan usaha garam, antara lain melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan akan alat-alat produksi
2. Pemenuhan kebutuhan dalam pemasaran hasil
3. Peningkatan kualitas hasil garam.

Masih rendahnya peranan koperasi dalam mendukung usaha garam rakyat juga ditunjukkan di aspek permodalan. Petambak garam justru paling banyak memanfaatkan jasa para petambak lain yang sukses untuk meminjam modal usaha. Hal itu disampaikan oleh 59,46 persen atau 49 orang petambak. Lembaga perbankan hanya dimanfaatkan oleh 4,05 persen atau 3 orang petambak untuk memperoleh modal. Jasa renternir dimanfaatkan oleh 4,05 persen tau 3 orang petambak dalam memperoleh modal. Dan kelembagaan koperasi hanya dimanfaatkan oleh 2,70 persen atau 2 orang petambak untuk mendapatkan modal usaha.

Maka, dalam pemasaran terdapat dua faktor yang harus ditingkatkan dalam upaya pemberdayaan petambak garam rakyat. Yaitu 1). Peningkatan kualitas garam; 2). Optimasi kelembagaan koperasi sebagai sentra pemasaran hasil garam. Meski demikian masih ditemukan tantangan dalam hal infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi hasil usaha garam. Data menunjukkan bahwa kondisi masih dirasa kurang mendukung bagi usaha garam. Kondisi demikian tampak dari pendapat responden yang menilai kondisi pematang masih dinilai kurang oleh 87,34 persen responden. Jalan menuju tambak masih dinilai kurang oleh 41,98 persen responden. Dan saluran air dinilai masih kurang oleh 40,74 persen responden. Secara lengkap kendala/permasalahan petani garam di Kota Pasuruan seperti nampak pada identifikasi melalui analisis SWOT dalam Gambar 1.

Kendala selanjutnya kurangnya pengetahuan teknologi budidaya garam yang baik. Dengan perencanaan strategi penguatan kelembagaan, dan meningkatkan mutu SDM yang ada guna mengatasi daya saing diharapkan dapat mendukung eksistensi kelangsungan petambak garam. Adanya hubungan yang kuat antar petambak sehingga saling mengenal diharapkan semakin tumbuh kekompakan dalam komunitas untuk bersinergi memunculkan ide-ide kreatifitas pengembangan produksi dalam menyikapi tantangan seperti musim yang tidak menentu, dan kemungkinan pesaing baru potensial yang masuk baik dari luar daerah maupun perusahaan asing.

### **Potensi Usaha Petambak Garam**

Keberhasilan petambak garam dalam menjalankan usahanya sangat tergantung seberapa besar kemampuan petambak garam mengenali kemampuan sumberdaya yang dimiliki dan mampu mengoptimalkan kekuatan tersebut untuk mengambil peluang usaha yang ada. Dengan menerapkan strategi yang dapat diimplementasikan dengan meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan teknologi produksi, pengembangan produk, dan pengembangan pasar.

Pola ekstensifikasi bisa dilakukan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi hamparan tambak yang belum dioptimalkan sebagai area pengolahan usaha garam rakyat. Jumlah petambak garam yang berhasil dilakukan pendataan melalui survey, menunjukkan bahwa sebanyak 48 petambak garam sebagai responden berada di 7 kelurahan/desa sebagai lokasi area tambak garam. Luas area lading garam mencapai 97,89 Ha mampu menghasilkan 6.660 Ton dalam satu kali masa panen

## SWOT

<b>INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN/ STRENGTH (S) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki SDM trampil dan berpengalaman</li> <li>▪ Hubungan antar petambak saling mengenal</li> <li>▪ Ketersediaan Bahan baku cukup/kondisi air tua</li> <li>▪ Lokasi mudah dijangkau</li> <li>▪ Saluran air cukup baik</li> <li>▪ Hasil produksi teresap</li> <li>▪ Status kepemilikan tambak</li> </ul>	<b>KELEMAHAN/ WEAKNESS (W):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya SDM mumpuni dari daerah sendiri</li> <li>▪ Harga kurang bersaing (rendah)</li> <li>▪ Teknik Pemasaran monoton</li> <li>▪ Keterbatasan modal</li> <li>▪ Teknologi produksi tradisional</li> <li>▪ Infrastruktur tidak mendukung</li> <li>▪ Kurang inovasi pemanfaatan teknologi</li> <li>▪ Belum ada variasi hasil produksi</li> <li>▪ Pemasaran yang belum luas</li> <li>▪ Lemah dalam sistem dan prosedur</li> <li>▪ Belum ada kelembagaan petambak garam</li> <li>▪ Sarana transportasi terbatas</li> </ul>
<b>EKSTERNAL</b>		
<b>PELUANG/ OPPORTUNITY (O):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemungkinan memasuki pasar baru</li> <li>▪ Memperluas Segmen pasar</li> <li>▪ Menambah line product</li> <li>▪ Diversifikasi product</li> <li>▪ Kemitraan Usaha</li> </ul>	<b>STRATEGI (SO):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas produk</li> <li>▪ Pengembangan pasar</li> <li>▪ Pengembangan produk</li> </ul>	<b>STRATEGI (WO):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan teknologi untuk produksi</li> <li>▪ Dukungan pemerintah</li> </ul>
<b>TANTANGAN/ANCAMAN/ THREAT (T):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Musim yang tidak menentu</li> <li>▪ Tingkat persaingan yang tinggi dengan wilayah lain</li> <li>▪ Perilaku Budaya Petambak garam rakyat</li> <li>▪ Adanya perusahaan pesaing dari luar daerah bahkan dari luar negeri</li> <li>▪ Lemahnya produktivitas akibat kurangnya inovasi teknologi.</li> <li>▪ Kurangnya pengetahuan teknologi budidaya garam yang baik</li> </ul>	<b>STRATEGI (ST):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan kreatifitas teknologi pengolahan</li> <li>▪ Penguatan Kelembagaan</li> <li>▪ Meningkatkan mutu SDM guna mengatasi daya saing</li> </ul>	<b>STRATEGI (WT):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan penuh pemerintah</li> <li>▪ Penguatan modal</li> <li>▪ Perkuat pemanfaatan lembaga sejenis</li> <li>▪ Mempertahankan segmen pasar</li> <li>▪ Inovasi teknologi</li> </ul>

Gambar 1. Matrik Swot Usaha Garam

Ilustrasi teoritik tentang teknis pengolah garam tersebut dapat memberikan gambaran pada sitem pengolahan usaha garam yang terjadi di Kota Pasuruan. Dari hasil survei ditemukan bahwa secara umum teknologi yang dimanfaatkan oleh petambak garam di Kota Pasuruan dengan sitem tradisional yang dipilih oleh 97,50 persen responden dan cara panen model maduris.

Pengolahan gara secara tradisional akan menghasilkan bentuk produk garam berupa krosak yang banyak dimanfaatkan oleh industri-industri. Kualitas garam yang dihasilkan dengan bentuk teknologi tradisional tersebut paling banyak menghasilkan garam kualitas K2 dihasilkan oleh 85,71 persen responden sebagai petambak garam. Meski demikian di Kota Pasurua masih ditemukan hasil produksi garam dengan kualitas K1 di 11 responden petambak garam.

Tabel 10. Kwaitas Garam Yang Dihasilkan

Option	Kualitas garam	Responden	Prosentase (%)
a.	Premium	1	1.30
b.	K1	11	12.99
c.	K2	71	85.71
TOTAL		83	100,00

Sumber: Survey Lapangan

Kualitas garam sangat dipengaruhi oleh kadar air. semakin rendah kadar air dalam garam semakin baik kualitas garam tersebut, sebaliknya semakin tinggi kadar air dalam garam

semakin rendah kualitas garam yang dihasilkan. Garam krosak yang dihasilkan oleh para petambak di Kota Pasuruan tidak melalui proses pengemasan, artinya garam dipasarkan begitu saja tanpa proses pengolahan lebih lanjut.

Potensi usaha garam jika didasarkan pada tingkat produksi setiap masa panen dapat ditentukan kriteria potensi di setiap desa/kelurahan sebagai berikut:

1. Panggungrejo dengan kapasitas produksi 2800 Ton;
2. Trajeng dengan kapasitas produksi 890 Ton;
3. Kepel dengan kapasitas produksi 890 Ton;
4. Ngemplakrejo dengan kapasitas produksi 770 Ton;
5. Gadingrejo dengan kapasitas produksi 550 Ton;
6. Mayangan dengan kapasitas produksi 520 Ton;
7. Mandaranrejo dengan kapasitas produksi 240 Ton

Potensi terakhir yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah adalah keinginan yang cukup tinggi petambak garam untuk membentuk KUGAR. Keinginankuat membentuk KUGAR disampaikan oleh 98,73 persen atau 82 orang petambak. Dengan terbentunya KUGAR maka pemerintah dapat melakukan langkah-langkah intensifikasi melalui kegiatan pembebrdayaan dan pendampingan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Kondisi sosial masyarakat petambak garam di Kota Pasuruan sangat berpengaruh terhadap perilaku lingkungan yang sehariannya banyak dihabiskan di area petambak, sehingga kebiasaan perilaku/gaya hidup sesuai dengan penghasilan yang dimiliki atau hasil yang didapat dari ketrampilan usaha dalam pengolahan lahan garam. Hal ini, usaha masyarakat petambak garam di Kota Pasuruan diperoleh dari garis keturunan keluarga dan pada umumnya memiliki ikatan kekeluargaan satu sama lainnya serta kekerabatan. Perilaku kehidupan masyarakat petambak garam yang sebagian besar dari masyarakat pesisir, yang mana memiliki kehidupan yang khas, dihadapkan langsung pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan tambak/laut. Masyarakat pesisir terutama nelayan kecil, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat petambak garam di Kota Pasuruan dalam menjalankan usahanya pada umumnya merupakan permasalahan yang klasik di antaranya, kualitas SDM para petambak garam itu sendiri, tidak kalah pentingnya jika diperhatikan dari profil ekonomi dan pendidikan secara umum masih rendah. Selanjutnya kondisi alat produksi yang dimiliki para petambak garam di Kota Pasuruan memang jauh dari kata ideal bagi pengolahan usaha garam apalagi mendekati kualitas hasil masih jauh dari harapan. Karena teknik pengolahan garam di Kota Pasuruan banyak menggunakan teknik tradisional oleh 97,50 persen petambak garam. Sedangkan cara pemanenan garam, sebagian besar menggunakan model maduris. Dengan teknik pengolahan garam yang masih tradisional tersebut dihasilkan kualitas garam K2 oleh 85,71 persen. Terkait dengan alat produksi misalnya, untuk alat produksi Kincir Angin hanya dimiliki oleh 68,86 persen, alat produksi Pompo Air hanya dimiliki oleh 3,29 persen. Kondisi pemasaran juga dirasa kurang begitu menguntungkan bagi petambak garam yang ada, karena peranan tengkulak

cukup dominan yaitu 73,75 persen, 13,75 persen dan 12,50 persen memasarkan secara mandiri hasil garam.

3. Potensi pola pengembangan usaha garam rakyat di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ini bisa dikembangkan melalui beberapa program peningkatan kualitas usaha garam baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan produksi dengan pola ekstensifikasi bisa diterapkan di Desa Ngemplakrejo karena masih terdapat hamparan tambak garam yang belum masuk PUGAR mencapai 8,1 Ha. Ekstensifikasi juga bisa dilakukan di Desa Mayangan. Selanjutnya potensi luasan area lahan tambak garam yang bisa dikembangkan dengan model ekstensifikasi di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini bisa dilakukan di beberapa kelurahan/desa lainnya. Pola ekstensifikasi bisa dilakukan pada area tambak garam yang tidak masuk dalam program PUGAR tahun 2011. Jadi dari kondisi usaha garam saat ini sebenarnya pola peningkatan produksi garam di Kota Pasuruan bisa dilakukan dengan dua pola utama yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Di mana intensifikasi yang sudah dilakukan saat ini tetap masih bisa dilakukan dengan memaksimalkan kualitas koordinasi baik dengan pemerintah setempat dan pendamping.

## Saran

1. Salah satunya pendekatan untuk meningkatkan pendapatan dari hasil usaha petani garam adalah melalui perbaikan kualitas produksi. Pemanfaatan kreatifitas teknologi pengolahan dalam rangka meningkatkan produksi garam sangat diperlukan, dengan teknologi produksi yang lebih baik dan ditunjang dengan kemampuan (*skill*) pengolahan yang baik pula maka produksi garam akan dapat ditingkatkan secara signifikan. Ada banyak cara inovasi teknologi pengolahan hasil untuk diperkenalkan (*life skill*) dan diimplementasikan diantaranya melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan dan akan lebih terarah melalui *pilot project*.
2. Salah satu faktor dalam pemberdayaan masyarakat adalah adanya kelompok (*capacity building*) atau lembaga yang tangguh melalui penguatan kelembagaan. Dengan pembentukan karakter petambak yang tangguh dan penguatan kelembagaan, maka akan lebih mudah untuk ditingkatkan kemampuannya baik teknik maupun manajemen.
3. Melihat kenyataan dan dari hasil survey terdapat kendala bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan tercermin dari rendahnya produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu dilihat dari kekuatan yang dimiliki dan sekaligus kelemahannya maka perlu adanya peningkatan mutu SDM guna mengatasi rendahnya produksi dan harga garam yang rendah.
4. Dukungan penuh pemerintah melalui fasilitas yang dimiliki serta peran pemerintah terutama pemenuhan modal dan mengatur tata niaga garam dalam rangka memperbaiki tingkat harga petambak garam.
5. Untuk mendayagunakan bantuan (BLM) dan targeting sampai tahun 2014, diperlukan peran besar dan kualitas koordinasi yang lebih baik melalui kemitraan antara Pemerintah, Kelompok KUGAR dan Pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Africa, T., 2003. *Social Statistics in the Development Agenda: Two Cases for Relevance*.  
Boelaars, Yan 1994. *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya*.  
Jakarta: Gramedia.

Hot Issue PT Garam 22 Pebruari 2011

Jayasuriya, R. and Q. Wodon, 2002. *Explaining Country Efficiency in Improving Health and Education Indicato: The Role of urbanization*. The World Bank.

Kartasamita, Ginandjar 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Korten DC dan Syahrir (ed). 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.

PT. Garam Persero 2000, dalam paparan Swasembada Garam Nasional Melalui Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), Kota Pasuruan 2011

Sihombing, U. 2000. *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi, Konsep, Kiat dan Pelaksanaan*. Penerbit: P.D. Mahkota, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*, PT Gramedia, Jakarta

Undang-undang RI No. 32 Th. 2004. 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Usman, S., 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 310

Widayati, Sri Wahyu 2001. "Prototipe Kepemimpinan Masyarakat Jawa dalam Karya Sastra Jawa Pesisiran", *Makalah Kongres Bahasa Jawa III*, di Yogyakarta, 15 Juli.

[http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Budaya\\_Masyarakat\\_Nelayan-Kusnadi.pdf](http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Budaya_Masyarakat_Nelayan-Kusnadi.pdf)

Zamroni, 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta. hal 208.